

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1 Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik</i>					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah realisasi belanja modal BUMN Infrastruktur dan Logistik	Triliun Rupiah	26,72	10.71	10.71	100%
1.2	Indikator 1.2 Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik	%	60	30	33.3%	111%
II	<i>Sasaran Program 2 Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah	%	50	-	87.5%	100%
III	<i>Sasaran Program 3 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda	%	80	40	40	100%

3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah	%	80	40	40	100%
3.3	Indikator 3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah	%	80	40	40	100%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100%
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputy Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik	%	92	40	40	100%

Kinerja Asisten Deputy Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik
---	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas Badan Usaha Milik Negara di Bidang Infrastruktur dan Logistik yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik
2. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Jumlah Realisasi Latar Belakang
Belanja Modal
BUMN Bidang
Infrastruktur dan
Logistik

Belanja modal (capital expenditure/capex) merupakan indikator penting untuk menilai komitmen investasi BUMN dalam memperluas kapasitas usaha dan mendukung agenda industrialisasi nasional. Tingkat realisasi capex mencerminkan efektivitas eksekusi program kerja dan keseriusan BUMN dalam berkontribusi terhadap prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pengukuran atas persentase realisasi belanja modal menjadi relevan sebagai indikator kinerja utama bagi koordinasi Kemenko Perekonomian dalam mendorong akselerasi pertumbuhan sektor industri prioritas.

Upaya Pengembangan Usaha BUMN membutuhkan belanja modal (capex) yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong hal tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring pada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik sehingga target persentase realisasi belanja modal tahun 2026 sebesar Rp26.717,8 Milyar berdasarkan kondisi terakhir yang kami pantau pada realisasi Capex BUMN s.d. Triwulan III 2025.

BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik yang dikoordinasikan belanja modalnya yaitu pada BUMN yang memiliki kriteria di antaranya: merupakan BUMN dengan nilai aset besar dan kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*), atau BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal, serta di bawah koordinasi Asisten Deputi Pengembangan BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik yakni:

1. Bidang Infrastruktur
 - a. PT Utama Karya (Target Rp6.934,6 M)
 - b. PT Jasa Marga (Target Rp6.884,3 M)
2. Bidang Logistik
 - a. PT Pelabuhan Indonesia (Target Rp5.449,6 M)
 - b. PT Kereta Api Indonesia (Target Rp7.449,3 M)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Rp26,72 Triliun. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada *cascading* dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun target triwulan sebesar Rp10.71 Triliun.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Belanja Modal (Capex) BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar Rp 10.71 Triliun (angka target) dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1	Realisasi	Triliun	10.71	10.71	100%
Jumlah Belanja	Modal	Rupiah			

BUMN Infrastruktur Logistik	Bidang dan				
-----------------------------------	---------------	--	--	--	--

Realisasi belanja modal pada Triwulan II 2026 masih menggunakan angka target karena sampai dengan pada saat laporan ini selesai dikerjakan, belum ada informasi yang didapat terkait dengan realisasi nyata dari belanja modal Triwulan II. Walaupun, angka Triwulan I masih relatif sedikit di bawah target TW I, namun kami masih optimis angka belanja modal TW II Tahun 2026 masih akan memenuhi target yang disepakati. Hal ini didasarkan kepada optimisme paska rencana penerbitan obligasi yang diterbitkan oleh Danantara, serta kebutuhan Pemerintah untuk menggerakkan perekonomian melalui Danantara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 2026 ini.

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis BUMN tahun 2026, belanja modal difokuskan pada pembangunan terminal pelabuhan strategis, jalan tol, gedung-gedung di IKN, serta pengadaan alat produksi seperti kapal. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan bisnis konstruksi, industri besi baja, dan sektor terkait lainnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi rencana belanja modal (<i>Capex</i>) tahun 2026 dengan BP BUMN	Terlaksana	Menghadiri Rapat Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN pada tanggal 21 Januari 2026
2	Penetapan Kriteria BUMN yang dilakukan <i>monitoring</i> terkait		Melakukan Penyempurnaan Konsep Manual IKU

	komponen target realisasi belanja modal		dan Rencana Aksi Tahun 2026 pada tanggal 17 Maret 2026
3	Reviu penetapan belanja modal BUMN berdasarkan kebijakan BP BUMN		
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
3	Monitoring realisasi belanja modal (capex) BUMN TW II 2026	Terlaksana	Melakukan monitoring realisasi belanja modal Capex, didasari pada surat BP BUMN

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum sesuai antara jadwal pelaporan kinerja BUMN dengan kebutuhan data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja ini, sehingga data dan informasi dari BUMN belum sepenuhnya tersedia karena masih dalam tahap konsolidasi.
2. Masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait, khususnya dalam rangka melakukan monitoring belanja modal BUMN
3. Perubahan Kementerian BUMN menjadi BP BUMN

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meng-update data dan informasi secara berkala guna mendukung pemantauan berkelanjutan atas pencapaian kinerja BUMN.
2. Meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

1.2. Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik

Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas usaha yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung, atau yang memberikan hak khusus kepada negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

BUMN memegang peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional melalui berbagai kontribusi terhadap penerimaan negara, termasuk dalam bentuk pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta fungsi-fungsi ekonomi lainnya. Selain mengedepankan tujuan komersial, BUMN juga menjalankan misi pelayanan publik dengan menyediakan barang dan jasa bagi kepentingan umum, membuka bidang usaha yang belum dapat dijalankan oleh sektor swasta, serta membina pelaku usaha kecil melalui program kemitraan.

Pengembangan usaha BUMN dilaksanakan melalui berbagai strategi, antara lain diversifikasi dan ekspansi usaha, restrukturisasi dan revitalisasi entitas, serta peningkatan sinergi antar-BUMN. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan penambahan pendapatan nasional agregatif atau pertumbuhan output dalam periode tertentu yang meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan indikator seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Dalam hal ini, peran BUMN sangat strategis sebagai instrumen negara dalam mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Selaras dengan peran tersebut, BUMN juga menerima penugasan dari pemerintah untuk menjalankan berbagai program strategis nasional, khususnya di bidang infrastruktur dan logistik. Penugasan ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sektor-sektor vital, serta mendukung penyediaan barang dan jasa publik yang belum dapat sepenuhnya dijalankan oleh swasta. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan penugasan ini, diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemantauan yang intensif oleh Kemenko Perekonomian agar pelaksanaannya berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Persentase Penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik dihitung dengan:

Persentase Realisasi Pelaksanaan Penugasan

$$= \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 realisasi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik sebesar 60%. Penetapan target tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJPN, dan Program Prioritas. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada Triwulan II adalah

sebesar 33%. Pada tahun 2026, terdapat beberapa proyek atau program penting terkait infrastruktur dan logistik yakni:

- a. Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Ratas Penanganan dan Pemulihan Bencana Sumatera (14 Desember 2025), Pemerintah dan BUMN bersinergi dalam pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di daerah pascabencana. Dalam hal ini, Danantara menugaskan BUMN Karya untuk melaksanakan pembangunan tersebut melalui skema kontrak kerja dengan Kementerian PU. Indikator penyelesaian penugasan ini adalah terbangunnya hunian sesuai kontrak. Dalam hal ini, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik akan melakukan pendampingan dan pemantauan untuk proses penyelesaian pembangunan hunian dimaksud.
- b. Penyelesaian pembayaran *reimbursement* kepada PT KAI, PT PELNI, dan PT ASDP atas penugasan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri/Kepala Badan yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara tanggal 28 Oktober 2025 tentang Penugasan kepada BUMN Sektor Transportasi dalam Pemberian Diskon Tarif Transportasi untuk Stimulus Ekonomi pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
- c. Penyelesaian pembayaran biaya salur atas penugasan PT Pos Indonesia melalui SKB Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Kepala BP BUMN, dan Kepala BPI Danantara tanggal 28 Oktober 2025 tentang Penugasan Khusus kepada PT Pos Indonesia untuk Penyaluran BLTS Kesra Tahun 2025

Hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik sebesar 30% atau mencapai 50% dari target Tahun 2025 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik	%	30	33.33	100%

Realiasi penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik yang mencapai 100% dari target sebesar 30% yang terdiri dari antara lain sebagai berikut:

- a. Penugasan terkait pembangunan Huntara dan Huntap
- b. Penugasan terkait Pemberian diskon tarif transportasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
- c. Penugasan terkait penyaluran BLTS Kesra 2025

Selain, penugasan yang telah disebutkan di atas, pada TW II ini juga terdapat penambahan penugasan terkait dengan Program Stimulus Angkutan Lebaran 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Presentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi persiapan reimbursement diskon transportasi periode libur Nataru 2025/2026 oleh PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP	Terlaksana	Pembuatan Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan stimulus Ekonomi Diskon Tarif Kereta Api pada tanggal 13 Maret 2026
2	Koordinasi rencana pelaksanaan stimulus diskon transportasi periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri tahun 2026 oleh PT KAI, PT Pelni, dan PT ASDP	Terlaksana	Pembuatan Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan imulus Ekonomi Diskon Tarif Kereta Api pada tanggal 13 Maret 2026
			Pembuatan Penyampaian Draf Risalah Rakor Tindak Lanjut Persiapan Pelaksanaan imulus Ekonomi: Diskon Transportasi, Pembatasan Angkutan Barang Periode Lebaran Idul Fitri 1447 H/2026 M pada tanggal 4 Maret 2026
			Pembuatan Penyampaian Surat Menteri Pekerjaan Umum terkait Dukungan Diskon Tarif Tol pada Periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M pada tanggal 12 Maret 2026
			Pembuatan Tindak Lanjut Usulan Tambahan imulus Diskon Transportasi Angkutan Laut Periode Idulfitri 2026 untuk Wilayah

			Papua pada tanggal 26 Februari 2026
			Pembuatan Tindak Lanjut Usulan Tambahan imulus Program Mudik Idulfitri Tahun 2026 untuk Wilayah Papua pada tanggal 17 Maret 2026
3	Koordinasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di daerah pascabencana oleh BUMN Karya	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Kunjungan Lapangan Rencana Pemulihan Pasca-Bencana Aceh pada tanggal 21 Januari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pangan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 3 Maret 2026
			Pembuatan Laporan Perkembangan Pemulihan Ekonomi Pascabencana di Aceh pada tanggal 12 Februari 2026
			Pembuatan Laporan Perkembangan Pemulihan Ekonomi Pascabencana di Aceh pada tanggal 19 Januari 2026
4	Koordinasi penyelesaian pembayaran biaya salur penyaluran BLTS Kesra oleh PT Pos Indonesia	Terlaksana	Pembuatan Laporan Rapat Percepatan Reimbursement Biaya Salur BLTS Kesra Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2026 pada tanggal 2 Maret 2026
			Pengiriman surat/dokumen terkait Permohonan Dukungan Rapat Percepatan Reimbursement Biaya Salur BLTS Kesra pada tanggal 19 Februari 2026
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
5	Koordinasi persiapan <i>reimbursement</i> diskon transportasi periode libur Nataru 2025/2026 oleh PT KAI, PT Peln, dan PT ASDP	Terlaksana	Pengiriman surat/dokumen terkait Notula Rakor Stimulus Diskon Transportasi pada tanggal 20 April 2026
6	Koordinasi evaluasi pelaksanaan stimulus diskon transportasi period HBKN Ramadan dan Idulfitri tahun 2026 oleh PT KAI, PT Peln, dan PT ASDP	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Evaluasi Diskon Transportasi dan Angkutan Lebaran 2026 dan Kunjungan Lapangan yang telah dilaksanakan pada 30 Maret 2026 – 1 April 2026 di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Pelabuhan Merak pada tanggal 1 April 2026 Pembuatan Penyampaian Realisasi Diskon Tarif Tol pada Periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H/ 2026 M dan Rancangan Instruksi Presiden RI tentang Koordinasi Penanganan Pergerakan Transportasi Masyarakat dan Barang pada Periode Tertentu pada tanggal 6 April 2026 Pengiriman surat/dokumen terkait Penyampaian Notula Rakor Stimulus Diskon Transportasi pada tanggal 18 Mei 2026 Pembuatan Notula hasil pembahasan Rapat Koordinasi Stimulus Diskon pada tanggal 2 Juni 2026 Pengiriman surat/dokumen terkait Surat Kunker

			monitoring dan evaluasi pelaksanaan diskon tarif Kereta Api DAOP 8 pada tanggal 25 Juni 2026
7	Koordinasi lanjutan penyelesaian pembayaran biaya salur penyaluran BLTS Kesra oleh PT Pos Indonesia dan Monitoring penyaluran BLT Bencana oleh PT Pos Indonesia	Terlaksana	Menyelenggarakan Pembahasan Update Proses Pembayaran Bea Salur Bansos PKH Tahun 2023 dan 2024, serta Bansos Sembako Tahun 2024 pada Tanggal 21 April 2026
			Pengiriman surat/dokumen terkait Realisasi Penyaluran BLTS Kesra Tahun 2025 pada tanggal 27 April 2026
			Pembuatan Exercise Rencana Program Stimulus BLTS Kesra Kuartal II Tahun 2026 pada tanggal 4 Mei 2026
			Pembuatan Laporan Rapat Percepatan Proses Pembayaran Tanggungan Pemerintah untuk Bea Salur ke PT Pos Indonesia pada tanggal 7 Mei 2026
			Pembuatan Penyampaian Konsep Surat Penutupan Kegiatan Pendampingan Hukum Program BLTS Kesra Tahun 2025 pada tanggal 9 Juni 2026
			Menyelenggarakan Undangan Rakor Usulan Pemulihan Daerah Pasca Bencana Sumatera pada Tanggal 24 Juni 2026
8	Monitoring pembangunan huntera dan huntap di daerah	Terlaksana	Pembuatan Permohonan Publikasi Kunjungan Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana ke

	pascabencana oleh BUMN Karya		Aceh pada tanggal 8 Mei 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan ST Kunjungan Lapangan Rencana Pemulihan Pascabencana (Distribusi Rantai Pasok Pangan, Evaluasi Penyaluran BLT Bencana, Perkembangan Pembangunan Hunian Sementara dan Hunian Tetap) pada tanggal 12 Mei 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat pendapat lain di media sosial terkait dengan kebijakan diskon transportasi dimana sejumlah Masyarakat menyampaikan bahwa lebih dibutuhkan diskon harga sembako ketimbang diskon transportasi;
2. Tantangan pemberian diskon tarif tol pada periode akhir libur sekolah di ruas tol Jakarta – Cikampek adalah pada penjelasan detail mengenai hitungan bisnis terkait insentif diskon ini kepada investor swasta terutama investor asing, karena 60% saham JLC ini dimiliki investor swasta. Para investor tidak mempermasalahkan adanya insentif diskon ini tetapi dikembalikan ke bisnis awal dan dalam PPJT tidak ada pasal mengenai diskon. Dalam hal ini, investor menghubungi Perusahaan menanyakan jangka waktu pemberian diskon tarif tol karena tidak disebutkan periode waktunya.
3. Permasalahan pada dasar hukum bagi BUMN untuk melakukan aksi korporasi berupa pemberian diskon tarif.
4. Efisiensi anggaran terutama di sektor infrastruktur menghambat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN bidang infrastruktur termasuk infrastruktur yang merupakan penugasan pemerintah kepada BUMN;
5. Masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/ rekomendasi perbaikan yang akan

dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Untuk melihat multiplier effect dari diskon tarif tol yang telah dijalankan selama ini, perlu mengecek apakah terdapat kenaikan pada data pariwisata sekitar yang terhubung jalan tol, salah satunya adalah kenaikan wisatawan yang berkunjung. Selain itu perlu juga melihat dampak perekonomian dari diberlakukannya diskon tarif tol selama ini kepada masyarakat sekitar;
2. Perlu melakukan kajian terkait diskon transportasi ini kaitannya dengan peningkatan perekonomian negara dan keuntungan bagi BUMN;
3. Pembuatan dasar hukum bagi BUMN yang akan melakukan pemberian tarif pada periode Nataru, yang ditandatangani oleh K/L terkait
4. Meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

2

Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Tersedianya Skema Pembiayaan Inovatif yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah

Latar Belakang

Tujuan utama dari sasaran ini adalah untuk memperluas kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan daerah pada transfer dari pusat, serta mempercepat realisasi program dan proyek pembangunan yang memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesuksesan implementasi skema pembiayaan inovatif sangat bergantung pada komitmen dan kesiapan daerah, termasuk dalam mengakses skema pembiayaan tersebut, misalnya pinjaman daerah. Pinjaman, bila dikelola secara hati-hati dan berbasis pada analisis kelayakan yang matang, bukanlah beban melainkan investasi jangka panjang. Komitmen ini mencakup keberanian mengambil keputusan strategis, kesiapan tata Kelola proyek, serta sinergi lintas sektor yang solid.

Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah merupakan alat untuk mengukur efektivitas dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketersediaan skema pembiayaan inovatif, khususnya melalui instrumen pinjaman daerah. IKU ini mencerminkan sejauh mana komitmen pinjaman yang telah disepakati dan direncanakan oleh Pemerintah Daerah benar-benar berhasil dicairkan dan dimanfaatkan untuk membiayai program serta kegiatan pembangunan. Adapun regulasi yang mendasari pelaksanaan pinjaman daerah

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

IKU Persentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah dihitung dengan membandingkan jumlah Pemda yang telah menandatangani perjanjian pinjaman, dengan jumlah Pemda yang masuk ke dalam pipeline pinjaman daerah PT SMI Tahun 2026 yang jangka waktunya melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut

$$\% \text{ Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah} = \frac{(\text{Jumlah Pemda yang Menandatangani Perjanjian Pinjaman} \times 100\%)}{\text{Total Pemda dalam Pipeline Pinjaman Daerah PT SMI}}$$

Adapun pada pipeline pinjaman daerah PT SMI Tahun 2026, terdapat tiga (3) Pemerintah Daerah yang menyampaikan permohonan pinjaman daerah yang jangka waktunya melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah pelaksanaan komitmen sebesar 50% dari *pipeline* Pinjaman Daerah yang dimiliki oleh PT SMI. Adapun realisasi penyelesaian penugasan yang telah dicapai pada Triwulan II dapat dilihat pada ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah	%	-	87.5%	100% (Memuaskan)

Mengingat panjangnya rangkaian tahapan yang dibutuhkan serta tingginya ketidakpastian *timeline* untuk dapat mencapai komitmen Pemerintah Daerah, maka target untuk IKU ini tidak dibuatkan target triwulanan.

Realisasi komitmen pinjaman daerah pada Tahun 2026 ditargetkan sebesar 50% dari total Pemda yang ada dalam *Pipeline* Pinjaman Daerah milik PT SMI, telah menandatangani komitmen perjanjian pinjaman. Berdasar kan target tersebut, serta upaya sosialisasi, peningkatan kapasitas perangkat Pemerintah Daerah maupun *debottlenecking* isu-isu yang muncul, Keasdepan BUMN di Bidang Infrastruktur dan Logisitik bersama para K/L terkait berhasil mendorong beberapa komitmen pinjaman daerah dari beberapa daerah dengan nilai total komitmen sebesar Rp 2.19 Triliun, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

1. Pemkab Gianyar, sebesar Rp 765,48 Milyar pada 10 Februari 2026

2. Pemkab Trenggalek, sebesar Rp 70 Milyar pada 21 April 2026
3. Pemkot Surabaya, sebesar Rp 885.85 Milyar pada 24 April 2026
4. Pemkot Singkawang, sebesar Rp 70 Milyar pada 27 April 2026
5. Pemkab Tasikmalaya, sebesar Rp 230.25 Milyar pada 30 April 2026
6. Pemkab Padang Pariaman, sebesar Rp 70 Milyar pada 21 May 2026
7. Pemkab Tebo, sebesar Rp 99.86 Milya pada 25 May 2026

Dari beberapa Daerah yang mengajukan Pinjaman Daerah, terdapat 1 Daerah yang pengajuannya mengalami kegagalan, yakni Provinsi Lampung di Bulan April 2026. Kegagalan ini diakibatkan oleh tidak disetujuinya pengajuan yang dilakukan Provinsi Lampung oleh komite (internal PT SMI) yang berada di luar kewenangan dari Kemenko Perekonomian.

Berdasarkan data di atas, maka realisasi untuk Triwulan II 2026 adalah sebesar 87.5% (7 Pemda membuat komitmen dan 1 Pemda gagal membuat komitmen Pinjaman Daerah).

Angka capaian sampai dengan TW II ini berada di atas target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain

- Regulasi yang sudah semakin *firm*.
- Sistem informasi yang mumpuni yang mendorong percepatan proses administrasi pengajuan Pinjaman Daerah
- Ketatnya anggaran di Daerah-Daerah serta tingkat suku bunga Pinjaman Daerah yang relatif kecil.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Presentase Realisasi Komitmen Pinjaman Daerah			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyusunan program kerja dalam rangka percepatan penyaluran pinjaman daerah	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Sosialisasi Penanganan Jalan Daerah Melalui Skema Pembiayaan Kreatif Dengan Optimalisasi Inpres No 11 Tahun 2025 terkait Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi pada tanggal 20 Februari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Focus Group Discussion (FGD) – Finalization and

			Confirmation of Findings Demand Side Assessment of Subnational Borrowing pada tanggal 4 Maret 2026
			Menyelenggarakan Rapat Koordinasi SOP Link Pinjaman Daerah pada Tanggal 26 Februari 2026
			Pembuatan Penyampaian Notula dan Konsep Surat Pengantar Deputi terkait Rapat Koordinasi SOP Link Triwulan IIV Tahun 2025 pada tanggal 18 Februari 2026
2	Monitoring dan evaluasi penyaluran dan pembayaran pinjaman daerah TW IIV 2025	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Persiapan Sosialisasi REFINA pada tanggal 21 Januari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pertimbangan 3 Menteri Refina pada tanggal 15 Januari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Asistensi Tata Kelola Pemanfaatan Pinjaman Daerah dengan Tema "Pembiayaan Utang Daerah Dalam Rangka Infrastruktur dan Pelayanan Publik, serta Memperkuat Kemandirian Fiskal Daerah" pada tanggal 3 Februari 2026
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
3	Monitoring dan evaluasi penyaluran dan pembayaran pinjaman daerah TW II 2026	Terlaksana	Pembuatan Penyampaian Konsep Notula Rakor SOP Link TW II Tahun 2026 pada tanggal 25 Mei 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah dan

			Perjanjian Pengelolaan DSRA Pemerintah Kabupaten Tebo pada tanggal 4 Juni 2026
4	Koordinasi potensi sinergi sumber pendanaan lainnya dengan pinjaman daerah, dan pendampingan calon debitur Pemda, serta penggunaan sistem informasi bersama untuk proses pengajuan, monitoring, dan evaluasi pinjaman daerah	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Focus Group Discussion (FGD) – Finalization and Confirmation of Findings Demand Side Assessment of Subnational Borrowing pada tanggal 4 Maret 2026
			Pembuatan Notula hasil pembahasan pada Breakfast Meeting Pinda SIHREN pada 28 Juni 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat kebijakan di beberapa *stakeholder* di lingkungan pusat bahwa untuk pinjaman yang diajukan melebihi periode masa jabatan kepala daerah, *underlying projects* harus merupakan aset yang dapat memberikan imbal balik usaha. Hal ini menjadi isu di Pemerintah Daerah yang ingin melakukan pinjaman daerah untuk dapat membiayai proyek yang tidak memberikan imbal balik secara langsung.
2. Pada pinjaman di sektor kesehatan, Pemda memiliki kesulitan untuk melakukan pengadaan alat kesehatan setelah rencana pembangunan fisik rumah sakit. Hal ini menjadi masalah untuk Pemda yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah karena ketakutan infrastruktur yang dibangun tidak dapat dimanfaatkan karena belum tersedianya alkes di Rumah sakit tersebut

Di sektor jalan, Pemerintah juga dapat mendorong pelaksanaan pinjaman daerah melalui sinergi program pinjaman daerah dengan program inpres

jalan. Skema ini menekankan pada peran insentif program inpres jalan bagi Pemda yang telah melakukan penerbitan pinjaman daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi Pemda untuk melakukan pinjaman daerah. Namun, program ini perlu koordinasi lebih lanjut di lingkungan Pemerintah Pusat terlebih dahulu

3. Masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait, khususnya K/L di sektor teknis.

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan menekankan pentingnya pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan inovatif daerah, terlepas dari kemampuan suatu proyek untuk memberikan hasil imbal balik. Selain itu, poin lain yang juga menjadi perhatian adalah kemungkinan untuk menyesuaikan periode pinjaman dengan masa umur aset infrastruktur yang dibangun
2. Melakukan koordinasi terkait dengan penyinergian program pinjaman daerah dengan program Pemerintah lainnya untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan pinjaman daerah serta memberikan insentif Pemda untuk melakukan pinjaman daerah
3. Meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik, dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda

Latar Belakang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik berperan penting dalam pelaksanaan sasaran strategis yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui:

- Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional;
- Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional;
- Pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional;
- Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang;
 1. Pengembangan BUMN di sektor Infrastruktur
 2. Pengembangan BUMN di sektor Logistik
 3. Inovasi pembiayaan daerah dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy. Sasaran strategis ini merupakan bagian dari perspektif internal business process yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif stakeholder, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Adapun nilai dari persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan BUMN di Bidang Infrastruktur dan Logistik dalam mendukung integrasi transportasi multimoda untuk logistik dan integrasi transportasi multimoda berbasis kawasan *Transit Oriented Development* (TOD).

% efektivitas SKP=Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda sebesar 80%. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 40% pada Triwulan II, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda	%	40	40	100% (Memuaskan)

Realiasi Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda mencapai 40% dari target sebesar 40% sampai dengan laporan ini disusun.

Realisasi ini didukung oleh serangkaian upaya koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung kebijakan dan implementasi integrasi multimoda oleh yang dilaksanakan oleh BUMN di bidang logistik.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi dan koordinasi penyelesaian isu strategis pengembangan TOD	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi Percepatan Operasional asiun Pondok Cina Baru di TOD Samea Mahata Margonda dan Connecting Bridge TOD Samea Mahata Serpong di Kantor Marketing Gallery Samea Mahata Margonda pada tanggal 24 Februari 2026
			Pembuatan surat/dokumen terkait Notula Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian dan Operasional TOD Samea Mahata Margonda dan TOD Samea Mahata Serpong pada tanggal 1 Maret 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional Menjelang dan Saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Puasa dan Idul Fitri pada tanggal 18 Februari 2026
2	Koordinasi optimalisasi	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Kunjungan Kerja KCIC

	integrasi transportasi intermoda dan multimoda internasional		terkait Proses EMU Maintenance dan Proses Operating Control Center pada tanggal 19 Februari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Kunjungan Kerja Pengembangan dan Pembangunan MRT Jakarta pada tanggal 18 Februari 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Kunjungan kerja terkait multimoda di Pelindo Belawan pada tanggal 26 Februari 2026
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
3	Koordinasi lanjutan serta monitoring penyelesaian isu strategis pengembangan TOD & Multimoda	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi Lanjutan Pengembangan Terminal Kijing Mempawah pada tanggal 13 April 2026
			Pembuatan Pengembangan Dry Port berbasis rel di KEK Batang pada tanggal 23 April 2026
			Pembuatan Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Inpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara pada tanggal 27 April 2026
			Membahas dukungan, koordinasi, dan langkah strategis dalam percepatan proses pemindahan aset serta pengembangan kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam yang menjadi bagian dari program pengembangan daerah dan pariwisata nasional pada tanggal 18 Mei 2026
			Pembuatan Laporan Hasil Perkembangan Pembahasan

			Percepatan Realisasi Pembangunan Jalan Tol Pontianak – Pelabuhan Kijing dalam mendukung Operasional Penuh Terminal Kijing pada tanggal 29 Mei 2026
			Menyelenggarakan Undangan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan integrasi logistik multimoda Surabaya pada Tanggal 26 Juni 2026
4	Monitoring pelaksanaan pengiriman perdana sinergi BUMN untuk mendukung ekosistem logistik haji	Terlaksana	Pembuatan Penyampaian Laporan Pengiriman Logistik Haji Melalui Sinergi BUMN pada tanggal 6 April 2026
			Pembuatan Konsep Surat Keputusan Tim Koordinasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Logistik Haji dan Umrah pada tanggal 9 April 2026
			Pembuatan Penyampaian Tanggapan terkait Permohonan Legal Drafting Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN pada tanggal 14 April 2026
			Pembuatan Konsep Surat Dukungan Monitoring dan Evaluasi Layanan Logistik Jamaah Haji 1447H pada tanggal 20 April 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terkait dengan TOD, ada beberapa kesulitan yang kami temui, yang cukup menghambat pelaksanaan rencana aksi di TW II ini, antara lain isu terkait perjanjian kerjasama antara KAI dan Perumnas, yang cukup menghambat proses peresmian TOD di Margonda, isu terkait dengan hukum yang menghambat peresmian TOD di Lenteng Agung, serta isu terkait dengan tawar menawar antara Perumnas, BUJT, serta Pemda Tangsel untuk TOD di Serpong. Hal ini menjadi isu karena Kemenko Perekonomian dianggap tidak memiliki kewenangan untuk terlibat pada urusan-urusan tersebut
2. Selain itu, isu keterbatasan anggaran juga menjadi masalah bagi Perumnas ataupun pihak lainnya untuk dapat melakukan pembangunan baru untuk TOD/Perumahan. Saat ini, Kemenko IPK sedang dalam tahap perumusan skema pembangunan perumahan yang juga dapat digunakan untuk pengembangan TOD.
3. Kendala dan upaya perbaikan pencapaian target diarahkan pada optimalisasi proses logistik dari hulu hingga hilir melalui evaluasi peran PT Pos Indonesia sebagai *forwarder*, penguatan komitmen layanan kargo PT Garuda Indonesia, serta peningkatan efisiensi biaya logistik bagi vendor UMKM.
4. Pengembangan layanan logistik multimoda masih menghadapi kendala pada aspek daya saing tarif, keterbatasan infrastruktur, dan fleksibilitas operasional, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan konektivitas antarmoda.

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait di pembangunan TOD untuk dapat melakukan update serta mendorong upaya kesepakatan antar pihak agar dapat melanjutkan progress pada pembangunan TOD *existing*.
2. Mendukung upaya perumusan alternatif baru skema pembiayaan infrastruktur perumahan.
3. Upaya perbaikan difokuskan pada penyelarasan skema harga, peningkatan kesiapan dokumen dan barang, optimalisasi kapasitas kargo melalui penguatan sinergi PT Garuda Indonesia dan PT Pos Indonesia, serta dukungan pemerintah dalam memperoleh persetujuan kapasitas kargo haji dan memperjelas skema kontrak penyelenggaraan logistik haji.
4. Perbaikan difokuskan pada penyempurnaan kebijakan operasional, percepatan infrastruktur, dan penguatan koordinasi guna meningkatkan daya saing logistik multimoda.

--	--

3.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah	Latar Belakang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik berperan penting dalam pelaksanaan sasaran strategis yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui: • Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang; 1. Pengembangan BUMN di sektor Infrastruktur 2. Pengembangan BUMN di sektor Logistik 3. Inovasi pembiayaan daerah dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy. Sasaran strategis ini merupakan bagian dari perspektif internal business process yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif stakeholder, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam rangka mendorong penguatan kerja sama antardaerah/(KAD), khususnya yang bertujuan mendukung pengembangan
--	---

infrastruktur dan efisiensi sistem logistik daerah.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah

% efektivitas SKP

$$= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah sebesar 80%. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 40% pada Triwulan II, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah	%	40	40	100% (Memuaskan)

Realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah mencapai 40% dari target 40% sampai laporan ini disusun.

Realisasi Triwulan II pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dilakukan dengan kegiatan koordinasi implementasi KAD Wilayah Jawa, lalu kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi KAD Wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kegiatan KAD dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi pangan pada setiap daerah. Koordinasi KAD ini dilakukan bersama Bank Indonesia dan juga pemangku kepentingan terkait, yang secara berkala proses pemantauan dilakukan pada kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerja Sama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi pengembangan sistem logistik paska bencana	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi Efisiensi Data Logistik Nasional pada tanggal 12 Maret 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Diskusi Optimalisasi Peran BUMN Logistik untuk Implementasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan persiapan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 pada tanggal 1 Maret 2026
			Menyelenggarakan Und Rapat Persiapan GNPIP pada Tanggal3 Februari 2026
			Pengiriman surat/dokumen terkait Diskusi Tindak Lanjut Implementasi KAD dan Persiapan GPIPS 2026 pada tanggal 23 Februari 2026
2.	Koordinasi implementasi KAD wilayah Sumatera	Terlaksana	Menyelenggarakan Rakor Persiapan GNPIP Wilayah Sumatera pada Tanggal29 Januari 2026
			Pembuatan Laporan Rencana KAD B2B Rumah Tani Nusantara dengan

			Dukungan Logiik PT Pos Indonesia untuk Kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 pada tanggal 9 Februari 2026
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
3	Koordinasi implementasi KAD wilayah Jawa	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Diskusi Teknis Persiapan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Wilayah Jawa dan persiapan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Jawa pada tanggal 6 April 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Proyek FOLUR pada tanggal 8 April 20206
			Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Peran BUMN dalam Mendukung Kerja Sama Antar Daerah (KAD) pada Tanggal22 Juni 2026
4	Monitoring dan evaluasi implementasi KAD Wilayah Kalimantan dan Sumatera	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan ST Sosialisasi Skema Implementasi Kemitraan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Sumatera Barat Tahun 2026 pada tanggal 21 April 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Grand Launching GPIPS dengan tema “Sinergi Penguatan Produksi Pascapanen dan Distribusi untuk Stabilitas Pangan dan Kesejahteraan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global” pada tanggal 18 Mei 2026
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.			

	Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut: 1. Meningkatnya biaya distribusi pangan akibat eskalasi geopolitik, mempengaruhi kegiatan KAD secara <i>business to business</i> (B2B) sehingga perlu adanya perbaikan skema KAD; 2. Belum optimalnya integrasi data surplus-defisit pangan antarwilayah di Jawa; 3. Belum optimalnya infrastruktur konektivitas, sarana, dan prasarana logistik KAD. Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai: 1. Perluasan dan penguatan KAD intra dan antarprovinsi dengan dukungan BUMN logistik maupun misi dagang dengan menyepakati skema KAD secara bersama oleh para pemangku kepentingan; 2. Penyediaan data produsen dan offtaker untuk penguatan neraca pangan daerah; 3. Pelaksanaan business matching dan fasilitasi distribusi pangan berbasis surplus defisit wilayah.
3.3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah	Latar Belakang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 menetapkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga dalam pengembangan BUMN. Dalam hal ini, Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik berperan penting dalam pelaksanaan sasaran strategis yang berfokus pada penguatan peran BUMN di sektor-sektor strategis tersebut melalui: • Penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional; • Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, di bidang; 1. Pengembangan BUMN di sektor Infrastruktur

2. Pengembangan BUMN di sektor Logistik
 3. Inovasi pembiayaan daerah dan kebijakan penugasan pemerintah untuk pelayanan publik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi. Sasaran strategis ini merupakan bagian dari perspektif internal business process yang menjadi sarana tercapainya sasaran perspektif stakeholder, yaitu terwujudnya kebijakan pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik yang berkualitas. Melalui kebijakan yang efektif, berkelanjutan, dan inovatif, BUMN di sektor-sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang mendukung inovasi pembiayaan daerah, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur. Proses tersebut dinilai efektif apabila kebijakan disusun melalui tata kelola yang baik (transparan, partisipatif, berbasis bukti), ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait lainnya, serta hasil pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi melalui laporan yang terstruktur.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Inovasi Pembiayaan Daerah

% efektivitas SKP

$$= \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah sebesar 80%. Adapun target realisasi penyelesaian penugasan tersebut pada adalah sebesar 40% pada Triwulan II, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah	%	40	40	100% (Memuaskan)
---	---	----	----	------------------

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah yang mencapai target merupakan hasil koordinasi yang era tantara berbagai stakeholders dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi pembiayaan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun transfer pusat.

Realisasi Triwulan II didorong oleh kuatnya minat pemerintah daerah dalam mengeksplor opsi-opsi alternatif dalam memenuhi gap kebutuhan daerah berupa pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. Selain itu, donor-donor erat bekerja sama dengan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dalam menjalani berbagai proses yang dibutuhkan tidak hanya dalam rangka penerbitan Obligasi maupun Sukuk Daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah, namun juga pelaksanaan KPBU untuk Daerah, serta potensi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan inovatif lainnya

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

3.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi pendampingan persiapan penerbitan Sukda Sumbar untuk indentifikasi calon project potensial, serta koordinasi lembaga donor untuk pendampingan	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Consultation Mission Tahap 2 Asian Development Bank (ADB) pada tanggal 19 Februari 2026

		persiapan penerbitan obda/sukda		
				Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Pembahasan Implementasi Skema Pembiayaan Kreatif dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur pada tanggal 12 Maret 2026
				Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penerbitan Sukuk Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tanggal 24 Februari 2026
				Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Penerbitan Sukuk Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tanggal 9 Januari 2026
	2	Identifikasi awal kebutuhan penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Tindak Lanjut Persiapan Penerbitan Sukuk Daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Obligasi Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2026
				Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Inisiasi Penerbitan Obligasi Daerah DKI Jakarta pada Tanggal 20 Februari 2026
				Pembuatan Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Penerbitan Sukuk Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Inisiasi Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Maret 2026
	3	Identifikasi kendala persiapan pembentukan Dana Abadi Daerah pada beberapa daerah yang sudah berjalan di tahun 2025, serta secara khusus, koordinasi awal	Terlaksana	Menyelenggarakan Rapat Teknis Update Progress Implementasi Dana Abadi Daerah pada Tanggal 27 Januari 2026

		kebutuhan pendampingan untuk persiapan pembentukan DAD Kab. Badung		
	4	Identifikasi proyek KPBU Quick Win 2026	Terlaksana	Menghadiri pertemuan terkait dengan koordinasi dan peninjauan lapangan terkait Pembangunan Proyek KPBU RSID Wangaya di RSUD Wangaya, Denpasar, dan Pembangunan Proyek APJ Kota Denpasar pada tanggal 4 Maret 2026
				Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi terkait Penanganan Pengaduan Tunggalan Availability Payment (AP) Proyek KPDBU APJ Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 6 Maret 2026
				Menghadiri pertemuan terkait dengan Diskusi dalam rangka Koordinasi KPBU untuk Proyek Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Februari 2026
				Menghadiri pertemuan terkait dengan Kick-Off Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Akademik terkait pengembangan skema pembiayaan proyek perumahan termasuk pengembangan skema KPBU sektor perumahan sebagai tindak lanjut hasil kajian Skema Build to Order (BtO) pada tanggal 1 Maret 2026
				Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Bersama

				KPBU pada tanggal 20 Februari 2026
				Menghadiri pertemuan terkait dengan Rapat Pertemuan dengan Asian Development Bank (ADB) Public Private Partnership Monitor 2026 pada tanggal 5 Maret 2026
				Menyelenggarakan Kunjungan dalam rangka Koordinasi KPBU untuk Proyek Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat pada Tanggal3 Februari 2026
				Pembuatan Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Penanganan Jalan Daerah melalui Skema Pembiayaan Kreatif pada tanggal 9 Februari 2026
				Pembuatan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Proyek Quickwin KPBU 2026 pada tanggal 12 Maret 2026
				Pengiriman surat/dokumen terkait Koordinasi KPBU untuk Proyek Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Februari 2026
	No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
	5	Koordinasi pendampingan persiapan penerbitan Obda/Sukda Sumbar dan DKI, serta koordinasi dukungan lembaga donor untuk pendampingan persiapan penerbitan obda/sukda	Terlaksana	Menyelenggarakan Undangan Rapat Pembahasan Update Progress Penerbitan Sukda Sumbar dan Obda DKI Jakarta pada Tanggal23 April 2026

				Pembuatan Konsep Surat Permohonan dan Surat Tugas DLN Jepang pada tanggal 18 Mei 2026
				Menghadiri pertemuan terkait dengan ST Seminar Sustainability Capital Market Roadmap & Potential of GSS + Bonds and Sukuk pada tanggal 18 Mei 2026
				Menghadiri pertemuan terkait dengan ST Konsinyering Penyusunan Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah pada tanggal 24 Juni 2026
				Pembuatan Penyampaian Konsep Surat Pelaksanaan Capacity Building DPRD terkait Obda/Sukda pada tanggal 25 Juni 2026
	6	Koordinasi awal terkait progress implementasi forum CSR pada beberapa Daerah dan pendampingan persiapan penerbitan DAD di Daerah potensial	Terlaksana dengan perubahan	Kondisi fiskal Perekonomian Daerah yang kurang begitu mendukung menyebabkan Daerah masih belum tergerak untuk menggunakan skema pembiayaan baru yang masih belum memiliki kebijakan yang kondusif, serta lebih memanfaatkan Silpa mereka untuk program krusial mereka. Iniasiasi utama dari pembiayaan daerah berasal dari Daerah itu sendiri, bukan dari Kemenko.
	7	Identifikasi kendala dan isu permasalahan pada penyelesaian proyek KPBU <i>Quick Win</i> 2026	Terlaksana	Pembuatan Penyampaian Brief Sheet Rapat Koordinasi Pejabat Tinggi Pimpinan Madya Kantor Bersama KPBU RI 7 April 2026 pada tanggal 6 April 2026
				Menghadiri pertemuan terkait dengan ST Rapat Koordinasi Pejabat Tinggi

			Pimpinan Madya Kantor Bersama KPBU RI pada tanggal 13 April 2026
			Pengiriman surat/dokumen terkait Masukan atas Konsep Pengembangan KPBU Sederhana pada tanggal 21 April 2026
			Pembuatan Laporan Hasil Rapat Koordinasi Terkait Penanganan Pengaduan Tunggakan Availability Payment (AP) Proyek KPDBU APJ Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 4 Juni 2026
			Menghadiri pertemuan terkait dengan Surat Tugas Kegiatan Kunjungan Lapangan ke Proyek KPBU Fly Over Sitingau Lauik (Panorama 1) pada tanggal 17 Juni 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Ketatnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah di satu sisi memang membuat Daerah berharap dapat melakukan alternatif pembiayaan inovatif, namun, di sisi lain, hal ini juga menyebabkan keraguan bagi kemampuan Pemda untuk dapat membayar kewajiban-kewajibannya. Hal ini jelas menghambat progress dari upaya pemanfaatan alternatif pembiayaan inovatif, seperti Dana Abadi Daerah dan Dana CSR. Hal ini nampak dari minimnya inisiatif Daerah pada alternatif-alternatif pembiayaan yang ada.
2. Situasi makroekonomi akhir-akhir ini juga menimbulkan risiko peningkatan suku bunga, yang berisiko meningkatkan beban bunga yang harus dibayarkan oleh Pemda, khususnya pada skema Obda/Sukda.

	3. Di sisi lain, efisiensi di internal Kemenko Ekon menyebabkan kesulitan untuk melakukan koordinasi maupun sosialisasi alternatif-alternatif pembiayaan inovatif 4. Ketatnya <i>timeline</i> persiapan penerbitan obda, baik untuk Provinsi DKI dan Sumbar, serta banyaknya <i>stakeholder</i> yang terlibat, membuat proses pengawalan penerbitan keduanya membutuhkan effort khusus serta perhatian dan waktu yang besar. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai: 1. Melakukan <i>breakdown</i> tahapan, kebutuhan, serta persyaratan terkait dengan upaya penerbitan Obda DKI dan Sukda Sumbar, serta melakukan koordinasi antar K/L terkait untuk memastikan lancarnya proses yang sedang dijalankan 2. Mencoba memberikan penjelasan kepada Daerah mengenai pentingnya pemanfaatan alternatif pembiayaan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Daerah 3. Pemanfaatan fasilitasi donor atau pihak lainnya, ataupun pemanfaatan <i>zoom meeting</i> pada agenda yang masih memungkinkan.
--	--

4

Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Presentase Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik

Latar Belakang

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan BUMN bidang infrastruktur dan logistik, (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang pengembangan BUMN bidang infrastruktur dan logistik, (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang BUMN bidang infrastruktur dan logistik, (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/ Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri atas 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan, Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata Jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik. Adapun target realisasi tingkat kepuasan tersebut adalah 3 dari 4 yang telah dicapai pada Triwulan II, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik	indeks	3 dari 4	3 dari 4	100% (Memuaskan)

Presentase Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik dilakukan melalui penyebaran survey kepada *stakeholders* terkait yang secara intens berkoordinasi dengan unit Keasdepan Pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik selama Triwulan II tahun 2026.

Realisasi Triwulan II dicapai dengan mendorong sebanyak 20 responden yang mewakili *stakeholders* terkait yang berkoordinasi dengan unit Keasdepan Pengembangan BUMN Infrastruktur dan Logistik selama Triwulan II tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Presentase Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Persiapan survei kepuasan layanan Semester I 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan persiapan survey kepuasan layanan koordinasi dan sinkornisasi kepada Koresponden terkait
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
2	Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan Semester I 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan survey kepuasan layanan koordinasi dan sinkornisasi kepada Koresponden terkait

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu

1. Efisiensi yang dilakukan pada awal tahun cukup membatasi ruang gerak bagi kami untuk melakukan sinkronisasi, serta koordinasi penyelesaian isu-isu yang masih membutuhkan perhatian
2. masih kompleksnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu

1. Pemanfaatan sarana *virtual meeting* ataupun fasilitasi lembaga-lembaga donor untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tetap membutuhkan anggaran
2. Meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Indeks Persentase

Pelaksanaan

Rencana Aksi RB

Asisten Deputi

Bidang

Pengembangan

Badan Usaha Milik

Negara Bidang

Infrastruktur dan

Logistik

Latar Belakang

Terwujudnya tata kelola Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik yang baik merupakan sasaran strategis yang berfokus pada perspektif learning and growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis perspektif learning and growth level ke deputian yakni Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan Logistik dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Infrastruktur dan Logistik:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan Logistik sebesar 92%. Adapun target realisasi tingkat kepuasan tersebut adalah 40% yang telah dicapai pada Triwulan II, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Persentase pelaksanaan	%	40%	40%	100% (Memuaskan)

Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik				
---	--	--	--	--

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan Logistik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan Rencana Aksi, Manual IKU serta penandatanganan Perjanjian Kinerja pada Januari 2026
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Telah disusun
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Seluruh administrasi persuratan telah dilakukan melalui SRIKANDI
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan

			pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
4	Penyusunan laporan kinerja TW II 2026	Terlaksana	Telah disusun
5	Penyusunan revisi renja 2026	Terlaksana dengan catatan	Tidak ada revisi
6	Optimalisasi pemanfaatan Srikandi	terlaksana	Seluruh administrasi persuratan telah dilakukan melalui SRIKANDI dan telah dilakukan verifikasi penilaian Audit Sistem Kearsipan Nasional

Pelaksanaan keseluruhan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, yakni melalui efisiensi yang telah dilakukan secara terpusat di Lingkungan Kemenko Perekonomian sejak awal tahun. Hal ini menyebabkan kami tidak dapat melakukan pendetailan dari penghematan yang dilakukan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Waktu penyusunan laporan kinerja sangat ketat, antara selesainya periode yang dilaporkan dengan *deadline* penyelesaian laporan kinerja tersebut. Terdapat beberapa data yang masih belum selesai pada saat laporan ini telah diselesaikan
2. Realibilitas dari Aplikasi Srikandi dirasa cukup rendah pada saat-saat krusial (beban workload yang besar pada saat bersamaan

Berdasarkan kendala–kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan penyiapan secara mencil jauh sebelum *deadline*, serta mendorong Sekretariat Deputy untuk lebih mempertimbangkan *deadline* pada hasil-hasil target yang dikerjakan secara terpusat di Kesesdepan
2. Mengajukan penambahan kuota byte aplikasi.

Jakarta, 2 Juli 2026

**Asisten Deputi Pengembangan BUMN
Bidang Infrastruktur dan Logistik**

Yuli Sri Wilanti

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing cursive letters that appear to be 'Yuli' followed by a surname.